

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang mempersiapkan pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun depan yaitu pada tahun 2024.<sup>1</sup> KPU sendiri adalah suatu wadah sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang berdaulat. Pemilihan umum (Pemilu) KPU diharapkan dapat menyelesaikan tugas maupun kewajibannya untuk mendapatkan pemimpin pemerintahan dimasa depan yang diharapkan dapat membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi semakin maju dan berkembang. KPU memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dapat diwujudkan dengan cara menunjukkan kinerja masing-masing pegawai komisioner maupun pegawai sekretariat KPU yang maksimal sebagai upaya memaksimalkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang akan diselenggarakan oleh KPU.<sup>2</sup>

Persiapan yang dilakukan menuju Pemilu biasanya akan dilakukan mulai satu tahun sebelum terjadinya Pemilu yang diawali dengan pendaftaran Partai Politik (Parpol).<sup>3</sup> Dalam kegiatan tersebut memiliki rangkaian tahapan yang tidak sedikit dan pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Tidak berhenti pada tahapan tersebut, akan ada tahapan selanjutnya sampai pada tanggal Pemilihan umum di tahun 2024. Pada bulan Juni KPU sedang dalam tahapan pendaftaran penerimaan pengajuan bacalon anggota DPRD. Pemilu di Kota Kediri sendiri akan dilakukan Pemilihan Legislatif yaitu memilih anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, Wali Kota

---

<sup>1</sup> Indonesia, 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, Jakarta.

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia, 2017, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembar Negara RI Tahun 2017, No. 60 Bab I. Sekretariat Negara, Jakarta.

<sup>3</sup> Wawancara dengan komisioner divisi sosial, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya pada tanggal 15 Desember 2023 di Kantor KPU Kota Kediri.

dan tentu saja pemilihan Presiden.<sup>4</sup> Oleh karena itu dapat dilihat akan banyak persiapan yang akan dilakukan mengingat banyaknya pemilihan yang akan dilakukan mengetahui bagaimana kinerja para pegawai komisaris hingga sekretariat KPU agar berjalan dengan efektif.

Dalam Pemilu memiliki tahapannya tersendiri yang mana memerlukan waktu 22 bulan sebelum pemungutan suara dan 2 bulan pasca pemungutan suara. Dengan adanya tahapan tersebut diperlukan pelatihan dan penambahan SDM yang ada di KPU. Penambahan SDM tersebut dikoordinir langsung oleh KPU provinsi sehingga tenaga kerja di masing-masing KPU kabupaten atau kota jumlahnya merata.<sup>5</sup> Namun beberapa kompetensi atau tugasnya tidak bisa dilakukan oleh tenaga PNS atau tenaga tambahan tersebut, sedangkan PNS pada KPU Kota Kediri hanya terbatas 11 orang saja.<sup>6</sup> Dikarenakan beberapa komponen tersebut yang tidak sembarang orang dapat membantu maka menimbulkan beban kerja tambahan yang bukan uraian kerja jabatannya. Disisi lain ada tahapan yang dilakukan secara bebarengan seperti pada tahapan pemilihan data peserta pemilih dan pendaftaran calon legislatif. Bahkan tahapan tersebut akan terus berjalan bergantian sampai pasca pemilihan yang berdampak pada pegawai tenaga pendukung ataupun bagian keuangan dan perencanaan ikut dalam tahapan yang sedang berlangsung walaupun diluar jobdesknya yang menjadi tugas tambahan.

Dengan adanya tahapan-tahapan pemilu tersebut yang terus berjalan maka KPU sudah tidak mengacu pada jam kerja melainkan mengacu pada jam 24 jam dengan sistem shif dan hari yang dipakai adalah hari kalender maka para pegawai harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut.<sup>7</sup> Dikarena perubahan tersebut maka KPU merencanakan kegiatan dalam tahapan-

---

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia, 2023, Undang-Undang No. 7 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>5</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016, Surat Edaran No. 5 Tahun 2016 tentang Pemerataan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten.

<sup>6</sup> Wawancara dengan komisioner divisi sosial, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya pada tanggal 15 Desember 2023 di Kantor KPU Kota Kediri.

<sup>7</sup> KPU Kota Kediri, <https://jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota/beritadetail-6e4d54315255316e4a544e454a544e45> diakses tanggal 07 Januari 2024

tahapan pemilu dengan membuat timeline yang berfungsi untuk mengatur kinerja para pegawai KPU Kota Kediri.<sup>8</sup>

Dalam struktur KPU terdapat komisioner yang salah satu tugasnya yaitu supervisi atau mendampingi, mengawasi dan membantu para pegawai KPU sehingga dapat meminimalisir pada kendala yang muncul pada saat mengerjakan pekerjaan diluar uraian jabatan pegawai karena beban kerja yang bertambah akibat padatnya tahapan yang perlu dilakukan sehingga diharapkan muncul prestasi kerja yang memuaskan.

Dari segi pegawai adanya beban kerja yang bertambah ada yang merasa keberatan namun adanya komisioner tersebut membantu menyadarkan bahwa jika pegawai sudah masuk pada ranah KPU maka ada perjanjian bekerja penuh dengan waktu sesuai dengan moto KPU berintegritas dan kesanggupan penuh waktu sehingga jika ada beban kerja tambahan diluar jam kerja maka harus diterima.<sup>9</sup> Namun tetap ada beberapa pegawai yang tidak memenuhi target atau tidak sesuai ekspektasi ataupun ada yang kurang sesuai apa yang diharapkan.

Pada salah satu jurnal penelitian efektivitas kinerja menghasilkan kesimpulan bahwa efektivitas kinerja sudah cukup baik dan penerapan pada pekerjaan dapat dikatakan sudah berhasil namun masih ada hal yang perlu diperbaiki sehingga dikatakan belum efektif secara menyeluruh. Hal ini terlihat pekerja yang sudah berkontribusi dalam menjalankan tugas pokoknya, dan kerja yang dihasilkan dapat dilihat dan dirasakan. Dalam efesiansi kinerja terdapat bebrapa faktor penghambat efektifitas pegawai. Fenomena ini tentu akan mengganggu efektifitas kinerja pegawai karena persoalan yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas, waktu, motivasi, produktifitas, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan kerja, serta sarana prasarana yang akan menjadi arah dari organisasi akan berpengaruh menurun.

Di dalam jurnal penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas mendapatkan kesimpulan bahwa adanya kekosongan komisioner KPU dikarenakan proses pergantian pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilu

---

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> KPU Kota Kediri, <https://jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota/beritadetail-5a645431523031334a544e454a544e45> d iakses tanggal 07 Januari 2024

Legislatif Tahun 2014 tidak menjadi kendala bagi Sekretariat KPU. Dengan adanya karakteristik organisasi yang solid, karakteristik lingkungan yang nyaman, dan karakteristik pekerja yang memiliki pengalaman mumpuni dalam organisasi, serta praktek manajemen dengan pola *human relations* yang dilaksanakan maka segala tantangan atau kendala yang akan atau sedang dihadapi pada pelaksanaan tahapan dan kegiatan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dapat diatasi dengan baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh juga pada efektivitasnya berjalan dengan baik pula.<sup>10</sup>

Pada jurnal lain memiliki temuan, yaitu kinerja KPU Kota Semarang dalam Pemilu 2014 dinilai belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan aspek yang belum berjalan optimal yaitu produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM yang ada akan tentu masih belum dikatakan optimalnya upaya KPU Kota Semarang dalam memaksimalkan sosialisasi dan masih minimnya dana yang disalurkan kepada KPU Kota Semarang.<sup>11</sup>

KPU Kota Kediri mengirimkan beberapa pegawainya untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pihak terkait dalam rangka persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir untuk Pemilu 2024 pada 6-7 Juni 2023 di Gubeng Surabaya. Rakor tersebut memiliki tujuan untuk dilakukannya koordinasi untuk membangun kerjasama yang kompak dalam menyusun daftar pemilih Pemilu Tahun 2024. Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 akan memasuki tahapan penyusunan DPSHP akhir oleh KPU Kabupaten atau Kota di tanggal 6 sampai 16 Juni 2023.<sup>12</sup> Membangun kerjasama bertujuan untuk mewujudkan pertukaran data secara lancar melalui sistem online dengan tetap menjamin kerahasiaan dan juga bertujuan untuk menyamakan data antara KPU Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan Bawaslu Provinsi dan

---

<sup>10</sup> M. Arif Almanar, Ria Ariany, Aidinil Zetra, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (2) (2019): 253-266.

<sup>11</sup> Desta Trianggoro, Endang Larasati, Nina Widowati, “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (Dalam Pemilihan Umum 2014)”, *Journal Of Public Policy And Management Review* Vol 4 no 2 2015, hal 1-10.

<sup>12</sup> Wawancara dengan komisioner divisi sosial, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya pada tanggal 15 Desember 2023 di Kantor KPU Kota Kediri.

Kabupaten atau Kota terkait penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024. Terdapat saran mengenai TPS di lokasi khusus untuk memetakan atau memilah pemilih TPS pada lokasi-lokasi khusus untuk mendapatkan hal suara sesuai daerah pemilihannya.

Pada tanggal 9 - 13 Juni 2023 dilaksanakan Rakor nasional berupa rapat Rakor persiapan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 oleh KPU RI yang digelar di Surabaya yang melibatkan Divisi Data dan Informasi serta admin atau operator aplikasi KPU. Persiapan penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 akan dijadwalkan pada tanggal 20 - 21 Juni 2023 untuk tingkat kabupaten atau kota se-Indonesia dan akan melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk memastikan ketepatan daftar dan data pemilih.<sup>13</sup> Terdapat usulan untuk didirikan TPS lokasi khusus yang datang dari kalangan mahasiswa. Hal dapat memiliki kemungkinan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halamannya pada hari pemungutan suara, dan meminta layanan untuk memilih dimana tempat menempuh studinya. Maka KPU akan terus mencari solusi sehingga DPT lebih komprehensif, valid dan mutakhir.<sup>14</sup>

Dalam proses pelaksanaan berbagai tahapan persiapan KPU penyelesaian tugas dalam tahapan harus tepat waktu sesuai dengan perintah dan serentak dengan KPU yang lain. Terdapat batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan tugas tersebut tidak boleh terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Disisi lain pemilihan umum merupakan area konflik maka KPU juga harus dapat mengolah konflik tersebut agar tidak menjadi bagian konflik maka KPU sangat dituntut untuk berintegritas.<sup>15</sup> KPU sendiri jika masuk dalam proses tahapan tidak ada jam kerja melainkan jam 24 jam dengan menggunakan sistem shift. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi yang berbadan hukum maupaun tidak berbadan hukum.

---

<sup>13</sup> KPU Kota Kediri, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11674/rakor-persiapan-rekapitulasi-dan-penetapan-daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilu-tahun-2024> di akses tanggal 07 Januari 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan komisioner divisi sosial, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya pada tanggal 23 Mei 2023 di Kantor KPU Kota Kediri.

<sup>15</sup> Wawancara dengan komisioner divisi sosial, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya pada tanggal 22 Juni 2023 di Kantor KPU Kota Kediri.

Pada tahap persiapan Pemilu menyebabkan berbagai tugas yang harus segera diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Agar dapat pekerjaan selesai tepat waktu tidak jarang pegawai KPU harus lembur meski tidak mendapatkan uang lembur. Tidak hanya terdapat batas waktu namun adanya banyak tugas yang padat menyebabkan pegawai KPU Kota Kediri mendapatkan tugas yang berlipat yang menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung menambah beban kerja pegawai. Dengan adanya beban kerja yang bertambah tentu saja fisik akan ikut bekerja yang mana hal tersebut membuat pihak KPU memberikan suplemen ataupun vitamin untuk menjaga kesehatan pegawai di tengah berbagai tugas yang harus dilakukan.<sup>16</sup>

Adanya beberapa alat atau fasilitas yang sedang dalam perbaikan maupun kurangnya peralatan membuat pegawai KPU harus membawa peralatan dari rumah seperti laptop ataupun printer untuk menunjang penyelesaian tugas yang diberikan agar pekerjaan tetap berjalan efektif.

Sehubungan dengan penjabaran di atas, maka penelitian ini ingin menggali informasi lebih lanjut terkait efektivitas kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi hambatan yang ada di KPU Kota Kediri dalam proses tahapan menghadapi Pemilu 2024.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan konteks penelitian, maka fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah efektivitas kerja KPU Kota Kediri pada tahun politik?
2. Apa saja hambatan yang dialami KPU Kota Kediri pada persiapan Pemilu 2024?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian berpedoman pada fenomena penelitian yang ditemukan. Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja KPU Kota Kediri menghadapi Pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam persiapan Pemilu 2024.

---

<sup>16</sup> Ibid.,

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil yang diharapkan pada penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian yang akan didapat nanti diharapkan dapat menyumbang data baru ataupun dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, rujukan serta acuan khususnya dalam bidang ilmu Psikologi Organisasi dan Industri yang berkaitan efektivitas kerja khususnya dalam KPU.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dalam sisi peneliti dapat membantu memperdalam pengetahuan peneliti, dapat menambah wawasan terkait efektivitas kerja dan memberikan pengalaman berharga bagi peneliti.
- b. Bagi lembaga IAIN Kediri penelitian ini berguna dalam pengembangan penelitian yang berhubungan dengan psikologi industri dan organisasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, mengembangkan penelitian-penelitian terkait efektivitas kerja.

#### **E. DEFINISI KONSEP**

Efektivitas kerja adalah sebuah ukuran kemampuan dalam melakukan fungsi, tugas, program ataupun misi dari suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah dibuat. Disisi lain efektivitas kerja berhubungan dengan hasil kerja dengan tujuan, semakin besar kontribusi hasil kerja dalam mencapai tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Namun sebaliknya, jika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan tugas atau program dengan tujuan yang ditetapkan maka dapat memperlihatkan tugas atau program yang sedang dilaksanakan belum efektif.

## F. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mengumpulkan data dari sumber sekunder berupa penelitian terdahulu yang relevannya terkait topik yang sedang dipelajari. Berikut beberapa penelitian yang menjadi inspirasi penelitian ini, yaitu:

1. Jurnal oleh Abdul Rahman, dkk. Tahun 2020 "Analisis Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup".<sup>17</sup>

Dari hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan data dalam penelitian yang dianalisis menggunakan model regresi linear berganda, diperoleh Fhitung sebesar 29.922 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikan) dengan nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa variable kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja dan kepuasan kerja, secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektifitas kerja pegawai.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel penelitian efektifitas kerja dan memiliki perbedaan terkait jenis penelitian dan subyek penelitian yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan subyek yang digunakan adalah pegawai KPU.

2. Jurnal oleh Nur Kholisa. Tahun 2012 dengan judul "Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan".<sup>18</sup>

Dari hasil yang data yang telah didapat menggambarkan hasil penelitian bahwa manajemen waktu pada karyawan non produksi memiliki kriteria baik yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam menyusun tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan baik memiliki tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat membagi waktu serta konsentrasi antara pekerjaan dengan kepentingan pribadi, dapat membuat jadwal sesuai dengan prioritas kepentingan, dapat meminimalkan gangguan yang mungkin akan muncul dan dapat

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman, dkk, "Analisis Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup", Jurnal Sinar Manajemen 2020 Vol 7, No 1.

<sup>18</sup> Nur Kholisa, "Hubungan Manajemen Waktu Dengan Efektivitas Kerja Karyawan" Journal of Social and Industrial Psychology 2012 Vol 1 no. 1.



membagi tugas pekerjaan yang kurang penting kepada orang lain. Sedangkan efektivitas kerjanya dalam kategori baik dengan dapat menjalin hubungan dengan rekan kerja secara baik serta selalu mengerjakan pekerjaan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Hasil analisis koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,512 dengan taraf signifikan ( $p$ ) 0,000 dimana nilai  $p < 0,01$ . Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen waktu dengan efektivitas kerja.

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu efektivitas kerja sedangkan perbedaannya adalah jenis penelitiannya berupa kuantitatif sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subyek yang digunakan pun berbeda dalam penelitian ini menggunakan subyek pegawai KPU sedangkan penelitian diatas menggunakan subyek pegawai pabrik non produksi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mirwanto dan Ida Farida. Tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Kinerja Pegawai Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung”.<sup>19</sup>

Setelah serangkaian riset dan pembahasan yang dilakukan dapat dikatakan efektivitas kerja dapat dikatakan sudah berhasil namun ada hal yang perlu diperbaiki sehingga dikatakan belum efektif secara keseluruhan hal tersebut dapat terlihat dari kontribusi dalam menjalankan tugas pokoknya dan hasil yang didapatkan. Ada persoalan yang ditemukan berkaitan dengan tugas waktu, motivasi, produktivitas, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan kerja serta sarana prasarana yang akan menjadi arah dari organisasi akan berpengaruh menurun. Maka dirumuskan kebijakan sebagai pendukung untuk pegawai lebih baik dalam bekerja yaitu memasukkan kegiatan dan ukuran tugas yang diberikan sesuai dengan bidang masing-masing sehingga kerja yang efektif akan lebih dirasakan.

---

<sup>19</sup> Mirwanto, Ida Farida, “Efektivitas Kinerja Pegawai Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung”, page: 69–74.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti efektivitas pegawai dalam bidang politik. Adapun perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

4. Jurnal yang ditulis oleh Yuliana Hartini, dkk. Tahun 21 dengan judul “Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018”.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mendapatkan beberapa informasi hasil yaitu dari pelaksanaan PILKADA seluruh pegawai KPU dapat menuntaskan semua tahapan PILKADA dengan baik dan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan dan menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan target yang ada, masih adanya pelanggaran walaupun basi kategori ringan namun tidak terjadi berulang-ulang atas pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi yang berupa teguran, dalam penyelenggaraan PILKADA dilaksanakan dengan jujur, adil dan transparan. Dengan adanya sikap saling mendukung satu sama lain, adanya berkoordinasi yang baik dapat menciptakan komunikasi yang baik dan saling bekerjasama dalam menuntaskan tugas yang telah diberikan sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah subyek dan tempat penelitian berbeda dan teori untuk pengukuran variabel berbeda. Namun memiliki persamaan meneliti terkait aspek efektivitas di bidang pemilihan umum.

5. Jurnal yang ditulis oleh Richo Rias Permana, dkk. Tahun 2017 "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kesadaran Kerja Terhadap Efektivitas Kerja

---

<sup>20</sup> Yuliana Hartini, dkk, “Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018”, Jurnal Profesional FIS UNIVED 2 Desember 2021 Vol. 8 No. 2.

Pegawai Pada Kantor Dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan".<sup>21</sup>

Dari hasil data yang didapatkan menunjukkan budaya organisasi KPU Kabupaten Pelalawan dikategorikan karyawan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan berdasarkan data dengan rata-rata tanggapan responden terhadap budaya organisasi pada angka 3,14. Dari pengujian yang telah dilaksanakan dinyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan pada efektivitas kerja Pegawai.

Berdasarkan tabulasi data yang telah diambil pada responden mengenai tanggapan efektivitas kerja pegawai menghasilkan tingkat kepuasan kerja pegawai masih rendah. Maka daripada itu diharapkan pihak manajemen KPU Kabupaten Pelalawan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai seperti dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, tunjangan dan insentif lainnya. Sedangkan berdasarkan nilai terendah pada tabulasi tanggapan responden terdapat pada pertanyaan pegawai terkait pada belum dimilikinya kemampuan yang baik dalam memahami arahan dari atasan secara umum.

Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian diatas menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan 2 variabel, dan memiliki persamaan berupa aspek yang diteliti terkait efektivitas kerja pada KPU.

---

<sup>21</sup> Richo Rias Permana, dkk. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kesadaran Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan", JOM Fekon Februari 2017 Vol 4 No. 1.